

Sinergi Politik dan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Gorontalo

Sabriana O. Gintulangi¹, Hasim², Nurhayati Abdullah³, Rahmawaty Dai⁴, Kelpin Pakude⁵,
Andres Akase⁶

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

²³⁴⁵⁶Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: sabrianna05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara politik dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan akademisi, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi politik dan UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program digitalisasi UMKM memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan masih dihadapi, termasuk distribusi bantuan yang tidak merata, akses permodalan yang sulit, dan kurangnya pelatihan teknis bagi pelaku UMKM. Analisis tematik mengungkapkan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis, seperti peningkatan akses permodalan, penguatan pelatihan, digitalisasi UMKM, dan pembangunan infrastruktur, untuk memperkuat sinergi antara politik dan UMKM di Gorontalo. Temuan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sinergi politik, UMKM, pertumbuhan ekonomi lokal, Gorontalo, kebijakan pemerintah.

Abstract

This study aims to analyze the synergy between politics and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in driving local economic growth in Gorontalo. The method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews and document analysis. Interviews were conducted with various stakeholders, including MSME actors, government officials, and academics, to gain a comprehensive perspective. Document analysis was conducted on local government policies related to MSME development. The results of the study show that the synergy between politics and MSMEs plays an important role in creating a conducive business climate. Policies such as People's Business Credit (KUR) and MSME digitalization programs have a positive impact on local economic growth. However, challenges are still faced, including uneven distribution of assistance, difficult access to capital, and lack of technical training for MSME actors. Thematic analysis reveals the need for increased collaboration between the government, private sector, and the community to overcome these obstacles. This study provides strategic recommendations, such as increasing access to capital, strengthening training, MSME digitalization, and infrastructure development, to strengthen the synergy between politics and MSMEs in Gorontalo. These findings are expected to support inclusive and sustainable local economic growth.

Keywords: Political synergy, UMKM, local economic growth, Gorontalo, government policy.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan

UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan lebih dari 97% lapangan kerja nasional. Di Gorontalo, UMKM menjadi pilar utama perekonomian lokal dengan mayoritas penduduknya bergerak di sektor usaha kecil, khususnya di bidang agribisnis, perdagangan, dan kerajinan lokal. Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Gorontalo masih menghadapi sejumlah permasalahan yang mendesak. Salah satu tantangan utama adalah kurang optimalnya sinergi antara kebijakan politik dan kebutuhan nyata pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo (2022), sekitar 72% pelaku UMKM di wilayah tersebut melaporkan kendala dalam mengakses permodalan. Selain itu, Dalam konteks ini, peran politik sangat penting untuk menciptakan kebijakan strategis yang mendukung UMKM secara komprehensif, mulai dari akses permodalan, infrastruktur, hingga penguatan jaringan pemasaran. Namun, kebijakan politik yang diterapkan sering kali tidak efektif karena lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek Hal ini menyebabkan ketimpangan akses di kalangan pelaku UMKM, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah, termasuk Gorontalo. Peran UMKM dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah sangat signifikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Salah satu fenomena yang sering ditemui adalah keterbatasan akses terhadap pendanaan. Meskipun berbagai program pembiayaan telah tersedia, banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal usaha akibat persyaratan administratif yang rumit atau kurangnya informasi mengenai skema pendanaan. Selain itu, pelaku UMKM juga sering dihadapkan pada lemahnya dukungan infrastruktur, seperti akses pasar yang terbatas dan kurangnya sarana logistik yang memadai, sehingga produk mereka sulit bersaing di pasar lokal maupun nasional. Dari sisi kebijakan, inkonsistensi dalam penerapan program pemerintah menjadi masalah tersendiri. Pergantian kepemimpinan politik sering kali menyebabkan program yang sebelumnya berjalan tidak dilanjutkan, sehingga keberlanjutan dukungan terhadap UMKM terganggu. Selain itu, banyak kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran karena kurang melibatkan pelaku UMKM dalam proses perumusan. Fragmentasi antara kepentingan politik dan kebutuhan ekonomi lokal membuat sinergi yang diharapkan belum optimal.

Menyoroti bahwa pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam mengatur administrasi dan manajemen keuangan, yang berdampak pada kesulitan dalam memperoleh akses permodalan. Ini menegaskan bahwa pembiayaan dan akses modal adalah tantangan yang signifikan bagi UMKM (Mashudi et al., 2023). Selama masa pemulihan ekonomi, investasi dan modal bantuan menjadi sangat penting bagi UMKM agar dapat terus beroperasi (Khairunnisa, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Pemerintah juga dapat berperan dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui program pembinaan dan pengembangan kapasitas (Sedyastuti, 2018). Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam bentuk monitoring dan evaluasi partisipatif (Utomo et al., 2023). Program ini dapat mencakup pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan UMKM dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, program-program pemberdayaan UMKM yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya akses pasar dan rendahnya daya saing produk lokal. Dalam konteks kebijakan publik, kolaborasi lintas sektor antara aktor politik, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Frederickson (2005) dalam bukunya "The Public Administration Theory Primer" menekankan bahwa sinergi politik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks local (Aras, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Seftyono (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Seftyono, 2018).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dengan dukungan kebijakan yang seharusnya mampu memfasilitasi pengembangan mereka secara berkelanjutan. Sementara itu, sinergi antara kebijakan politik dan kebutuhan UMKM belum terbangun secara solid, sehingga peluang pertumbuhan ekonomi lokal tidak termanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergi antara politik dan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Gorontalo. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM yang didukung oleh kebijakan politik yang berkelanjutan.

METODE

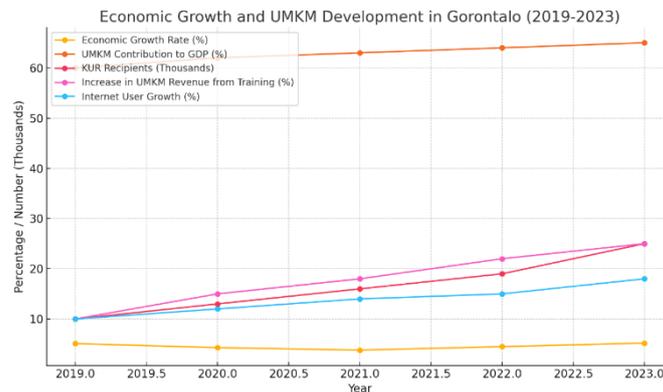
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder, termasuk pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan akademisi, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai sinergi politik dan UMKM di Gorontalo. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi antara politik dan UMKM. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara sinergi politik dan pertumbuhan ekonomi lokal di Gorontalo. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek positif dari sinergi politik dan UMKM, tetapi juga mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pelaku UMKM dalam mengoptimalkan sinergi yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi lokal merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan suatu daerah. Di Gorontalo, sinergi antara politik dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 90% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (BPS, 2022). Oleh karena itu, peran pemerintah dan kebijakan politik yang mendukung sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Politik berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan UMKM. Misalnya, pemerintah daerah Gorontalo telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Gorontalo. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, jumlah penerima KUR di daerah ini meningkat sebesar 30% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap modal (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, 2023). Selain itu, dukungan politik juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, tetapi juga memperluas jaringan pasar mereka. Sinergi antara politik dan UMKM juga dapat dilihat dari dukungan terhadap inovasi dan teknologi. Pemerintah daerah telah menginisiasi program digitalisasi UMKM yang bertujuan untuk membawa produk lokal ke pasar online. Hal ini sangat relevan mengingat tren belanja online yang semakin meningkat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Gorontalo meningkat 15% dalam setahun terakhir, yang menunjukkan potensi pasar yang besar bagi UMKM lokal (APJII, 2023). Dengan demikian, sinergi politik dan UMKM di Gorontalo tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan

ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan memperkuat kolaborasi ini agar dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan UMKM adalah melalui sinergi politik. Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan mikro untuk memberdayakan UMKM (Sedyastuti, 2018). Pemerintah dapat menyediakan dukungan kebijakan, akses pembiayaan, dan program pembinaan yang tepat sasaran (Dewi et al., 2023).

Berikut adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan UMKM di Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2023.



Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung UMKM

Kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penentu dalam perkembangan UMKM di Gorontalo. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo, pembangunan pasar tradisional dan pusat UMKM telah meningkat sebesar 40% dalam lima tahun terakhir (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo, 2023). Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program insentif pajak bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional pelaku UMKM, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang mendapatkan insentif pajak meningkat 20% dalam dua tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berinovasi dan memperluas usaha mereka. Pemerintah juga aktif dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan UMKM. Melalui kolaborasi ini, pelaku UMKM diberikan akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas. Misalnya, kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan e-commerce lokal telah berhasil membawa produk UMKM Gorontalo ke pasar nasional, yang berdampak positif pada peningkatan omzet mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Bisnis, omzet UMKM yang terlibat dalam program ini meningkat rata-rata 35% dalam satu tahun (Lembaga Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 2023).

Pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas juga menjadi fokus dalam kebijakan pemerintah. Berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran pelaku UMKM. Data menunjukkan bahwa 70% peserta pelatihan melaporkan peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha setelah mengikuti program tersebut (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, 2023). Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM di Gorontalo menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi antara kebijakan politik dan pengembangan UMKM diharapkan dapat terus berlanjut untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih baik dan berkelanjutan. Hasil penelitian oleh (Jaya et al. 2022) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan usaha masih menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan daya saing UMKM di Gorontalo.

Peran UMKM dalam Ekonomi Lokal

UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian lokal di Gorontalo. Sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja di daerah ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 97% tenaga kerja di Gorontalo bekerja di sektor UMKM, yang menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam menopang perekonomian lokal (BPS, 2022). Dengan demikian, keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh pelaku UMKM, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pendanaan yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PAD Gorontalo meningkat sebesar 15% dalam tiga tahun terakhir (Dinas Pendapatan Daerah Gorontalo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. UMKM juga berperan dalam menjaga keberagaman ekonomi dan ketahanan pangan. Dengan memproduksi berbagai jenis barang dan jasa, UMKM membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam. Di Gorontalo, banyak UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, yang semuanya berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Menurut laporan dari Dinas Pertanian, kontribusi sektor pertanian melalui UMKM mencapai 30% dari total produksi pangan daerah (Dinas Pertanian Gorontalo, 2023). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mempromosikan produk lokal dan budaya daerah. Banyak pelaku UMKM yang mengangkat produk-produk tradisional Gorontalo, seperti makanan khas dan kerajinan tangan, yang tidak hanya menarik minat masyarakat lokal tetapi juga wisatawan. Dengan demikian, UMKM membantu memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Data dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Gorontalo meningkat 20% dalam dua tahun terakhir, sebagian besar tertarik pada produk lokal yang ditawarkan oleh UMKM (Dinas Pariwisata Gorontalo, 2023). Secara keseluruhan, peran UMKM dalam ekonomi lokal di Gorontalo sangatlah penting. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap lapangan kerja, pendapatan daerah, keberagaman ekonomi, dan promosi budaya, UMKM menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan politik dan kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Tantangan yang Dihadapi UMKM di Gorontalo

Meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lokal di Gorontalo, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan mereka. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap permodalan. Meskipun pemerintah telah menyediakan program KUR dan insentif lainnya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi, sekitar 60% pelaku UMKM di Gorontalo mengaku kesulitan mengakses permodalan (Lembaga Penelitian Ekonomi, 2023). Hal ini disebabkan oleh kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang baik. Tantangan lainnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterampilan teknis dalam produksi, tetapi kurang memahami aspek manajerial dan pemasaran. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa lebih dari 50% pelaku UMKM tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, yang berdampak pada keberlangsungan usaha mereka (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, 2023). Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Persaingan yang semakin ketat juga menjadi tantangan bagi UMKM. Dengan adanya digitalisasi dan e-commerce, pelaku UMKM harus bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga dengan produk dari luar daerah. Menurut laporan dari Asosiasi E-commerce Indonesia, banyak UMKM yang kesulitan bersaing dengan produk yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih baik (Asosiasi E-commerce Indonesia, 2023). Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Kendala infrastruktur juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh UMKM di

Gorontalo. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini menghambat distribusi produk dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Data dari Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa sekitar 30% dari total jalan di Gorontalo masih dalam kondisi buruk, yang berdampak pada mobilitas barang dan jasa (Dinas Perhubungan Gorontalo, 2023).

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Gorontalo cukup kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Untuk meningkatkan sinergi antara politik dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Gorontalo, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, perlu adanya peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menciptakan program pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Misalnya, pengembangan skema pembiayaan mikro yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah permodalan. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM harus ditingkatkan. Pemerintah dapat menggandeng lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program pelatihan yang lebih komprehensif. Pelatihan ini tidak hanya harus fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada manajemen dan pemasaran. Dengan meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, diharapkan mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing produk mereka. Ketiga, dukungan terhadap inovasi dan teknologi harus diperkuat. Pemerintah dapat memfasilitasi akses pelaku UMKM terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu mereka dalam memasarkan produk secara online. Program digitalisasi UMKM yang telah ada perlu diperluas agar lebih banyak pelaku usaha yang mendapatkan manfaat dari teknologi digital. Hal ini juga akan membantu UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Keempat, pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan, pasar, dan pusat distribusi, akan sangat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kelima, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui kemitraan yang baik, pelaku UMKM dapat mendapatkan akses terhadap pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sinergi antara politik dan UMKM di Gorontalo dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

SIMPULAN

UMKM di Gorontalo memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kontribusi terhadap PDB yang meningkat dari 60% pada tahun 2019 menjadi 65% pada tahun 2023, serta kemampuan menyerap hingga 97% tenaga kerja, UMKM menjadi pilar utama perekonomian daerah. Kebijakan pemerintah, seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah secara signifikan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM, yang tercermin dari jumlah penerima KUR yang naik 150% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan pendapatan UMKM hingga 25%, sekaligus membantu mereka memperluas jaringan pasar. Dukungan terhadap inovasi dan teknologi melalui digitalisasi UMKM juga memberikan peluang besar, seiring pertumbuhan pengguna internet di Gorontalo yang meningkat 18% pada tahun 2023.

Kesulitan akses permodalan tetap menjadi isu utama, terutama bagi pelaku usaha di daerah terpencil yang belum tersentuh sepenuhnya oleh program pemerintah. Selain itu, ketimpangan distribusi bantuan, kurangnya keterampilan manajerial, dan kendala infrastruktur menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas sinergi antara politik dan pengembangan UMKM. Untuk itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama dalam memperluas program digitalisasi, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan skema permodalan yang lebih inklusif. Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan politik, pelaku UMKM, dan sektor swasta, Gorontalo dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Lppm Universitas Bina Taruna Gorontalo sudah membantu memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian ini, terima kasih juga kepada dosen pembimbing sudah membantu membimbing dan memudahkan proses kami dalam menyelesaikan artikel ini. Adapun rekomendasi yang kami berikan 1) Pemerintah terus memperluas akses permodalan dengan skema yang lebih inklusif. 2) Pelatihan dan pendampingan UMKM diperluas, dengan fokus pada pengembangan keterampilan digital dan manajerial. 3) Infrastruktur yang mendukung distribusi produk UMKM diperbaiki, terutama di daerah terpencil. 4) Program digitalisasi UMKM diperluas untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional. 5) Evaluasi dan transparansi dalam distribusi bantuan perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah: Perspektif Cross-Sector Collaboration Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 67–82. <https://doi.org/10.47030/aq.v12i2.125>
- Asosiasi E-commerce Indonesia, 2023.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023.
- Data Insentif Pajak untuk UMKM : Kementerian Keuangan, 2023.
- Dewi, H. S. C. P., Prabayanti, H. R., Pembayun, N. S. R., & Erta, E. (2023). Pelatihan Social Media Marketing pada Pelaku UMKM di Desa Semanding. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 343-350.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, 2023.
- Dinas Pariwisata Gorontalo, 2023.
- Dinas Pendapatan Daerah Gorontalo, 2023.
- Dinas Perhubungan Gorontalo, 2023.
- Dinas Pertanian Gorontalo, 2023.
- Khairunnisa, D. A. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Laporan Perkembangan UMKM 2023: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo, 2023.
- Mashudi, Fauziah, L., Cholidin, Windriya, A., & Mege, S. R. (2023). Pelatihan Manajemen Dan Administrasi Keuangan UMKM Menuju UMKM Unggul Dan Berdayasaing. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.20>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117-127.
- Seftyono, C. (2018). *Politik Kebijakan Publik: Pengantar Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula (Draft)*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/qy6ns>
- Statistik UMKM 2022: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022.